

Berita Kunjungan Diplomatik sebagai Media Event di *The Jakarta Post*

Oleh: Nita Andrianti

Dosen Akademi Komunikasi Radya Binatama Yogyakarta, Minat kajian pada bidang Broadcasting.

Korespondensi:

Email: nietha_soulmate@yahoo.com

Akademi Komunikasi Radya Binatama Yogyakarta Jl. Raya Janti Karangjambe Banguntapan Banguntapan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstract

The research about the content analysis of diplomatic visits as a media event in the "The Jakarta Post", this research approach used the descriptive quantitative with content analysis method, it is systematic characteristic, objective, and quantitative. The result of the research show: mass media as instrument of international communication in public diplomacy. The implication it to increased positive image of Indonesia state, increased to the national goals (example comprehensive partnership with United States); and to participate toward the establishment of a world order based on freedom, perpetual peace and social justice. But, not yet comprehensive understanding about the function of media diplomacy in the interaction of international politics and communication, example the news "pro" for the official state visits, don't the content of bilateral relations (benefit and disadvantage of relations).

Keywords: *Diplomatic Visits, Content Analysis, Media Event, The Jakarta Post*

Abstrak

Penelitian ini mengenai analisis isi berita kunjungan diplomatik sebagai media event di *The Jakarta Post*, pendekatan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*), metode analisis isi ini dikenal sebagai sebuah metode penelitian yang sistematis, obyektif dan cenderung kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media massa merupakan alat komunikasi internasional dalam diplomasi publik. Media massa sebagai instrumen diplomasi publik telah memberikan peningkatan citra positif Indonesia, peningkatan tujuan nasional (misalnya *comprehensive partnership with US*); dan peningkatan tujuan bersama untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun hal ini belum disertai dengan pemahaman komprehensif fungsi media massa sebagai media diplomasi publik dalam interaksi politik dan komunikasi internasional, misalnya kecenderungan berita pro yang mengarah pada dukungan media massa terhadap pejabat yang berkunjung bukan substansi hubungan bilateral (keuntungan dan kerugian kerjasama).

Kata Kunci: *Kunjungan Diplomatik, Agenda Media, The Jakarta Post, Analisis Isi*

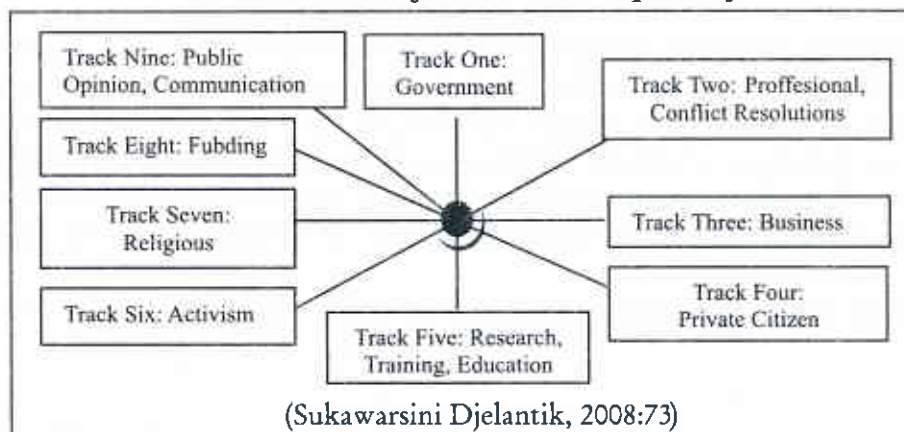
Pendahuluan

Diplomasi merupakan komunikasi internasional yang mewakili tekanan politik, ekonomi, militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsesi antara para pelaku negosiasi. Untuk mencapai kepentingan nasional, keterampilan dalam berdiplomasi merupakan syarat utama sebagai sarana pencapaian kesepakatan, kompromi, dan penyelesaian masalah dimana tujuan-tujuan

pemerintah saling bertentangan (Djelantik, 2008: 4). Perkembangan diplomasi publik menjelaskan bahwa aktor diplomasi tidak hanya negara/pemerintah (diplomat), tetapi diplomasi publik merupakan diplomasi yang melibatkan beberapa aktor dalam proses diplomasi, yaitu: aktor pemerintah, kalangan profesional dan aktor dalam penyelesaian konflik, pengusaha, masyarakat, aktor peneliti dan akademisi, kalangan aktivis, kalangan agamawan, kalangan pemodal, yang terdesain dalam skema di bawah ini:

Skema 1.

The Nine Tracks of Multi-Track Diplomacy



Model di atas menunjukkan posisi sembilan aktor yang terlibat dalam diplomasi publik, jalur kesembilan (media massa) merupakan aktivitas komunikasi internasional yang memiliki fungsi strategis karena menyatukan semua aktor diplomasi publik, melalui fungsi yang dilakukan media massa. Penyatuan aktor dalam arti bahwa media massa mengakomodir pandangan dari aktor tersebut, misalnya kunjungan diplomatik membahas agenda diplomasi ekonomi tentu idealnya media massa juga harus memberitakan pandangan-pandangan aktor bidang ekonomi, seperti

akademisi, pemilik modal, pengusaha, dan lainnya (Djelantik, 2008: 73). Sehingga dengan menghadirkan beberapa pandangan aktor diplomasi publik melalui komunikasi internasional dengan jalur media massa dapat membangun budaya politik pembacanya (Muhtadi, 2008:152).

Peranan media massa yang sangat besar dalam diplomasi publik terlihat dengan adanya "media event" yang memberitakan berita kunjungan diplomatik secara komprehensif, salah satu diantaranya media massa *The Jakarta Post*, pandangan Nunung

Prajarto bahwa pemanggul beban yang lebih tepat dalam komunikasi internasional (*diplomasi: penulis*) adalah media massa asing atau media massa Indonesia yang berbahasa asing, dan *The Jakarta Post* adalah media massa nasional yang menggunakan berbahasa Inggris (internasional) (2003:4).

The Jakarta Post dalam memberitakan berita kunjungan diplomatik tentunya memiliki standar penilaian kelayakan berita sebagai *media event*, penilaian media massa dapat dilacak dari koverasi surat kabar yang memenuhi kelayakan berita, serta terkait dengan kelengkapan berita, nilai berita, dan kedalaman berita (Wahyuni, 2006:3). Terkait dengan hal ini, liputan kunjungan diplomatik pejabat negara lain ke Indonesia memiliki penilaian standar kelayakan dan kedalaman berita yang menunjukkan adanya kecenderungan pentingnya berita kunjungan diplomatik, konteks pentingnya berita sebagai peristiwa menjadi *media event* mengarah pada pencapaian kepentingan nasional Indonesia yang lebih baik, dan penataan hubungan antar negara yang saling menguntungkan.

Dalam berita kunjungan diplomatik terdapat kecenderungan berita yang dianggap sangat penting dan layak, selain itu terdapat berita kunjungan diplomatik yang kurang dianggap penting dan layak. Hal tersebut memunculkan problem bahwa berita sebagai *media event* tidak memiliki standar penilaian kelayakan berita, hal ini tentunya disebabkan oleh agenda media massa yang kurang merujuk pada pemahaman *media event* dalam konteks diplomasi, artinya

media event kurang memperhatikan standarisasi pedoman “diplomasi dengan media massa” yang mengarah pada agenda pencapaian kepentingan nasional/publik, dalam bahasa Mc Combs and Shaw (1984) kecenderungan isi media atau agenda media mengarah pada kecenderungan agenda publik. Berdasar pada ilustrasi di atas, penelitian ini mengkaji masalah bagaimana kecenderungan *The Jakarta Post* dalam memberitakan kunjungan diplomatik pejabat negara lain ke Indonesia?

Sebagai kerangka pemikiran, maka penelitian ini mengangkat tentang komunikasi internasional dalam *media event* terutama yang berkaitan dengan diplomasi. Komunikasi internasional merupakan komunikasi yang dilakukan komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan negara lain dan bertujuan untuk memperoleh dukungan, bantuan, kerjasama, melalui berbagai media komunikasi atau media massa internasional. Dalam komunikasi internasional, media massa merupakan komunikator paling intens dalam melakukan penyebaran informasi, diusung dari fakta maupun isu internasional dan pembentukan opini publik. Subjek ditelaah bukanlah sekedar arus itu sendiri, melainkan juga struktur arus yang terbentuk, aktor-aktor di dalamnya, sarana, efek, serta motivasi yang mendasarinya. Kesemuanya bertujuan untuk memperoleh dukungan, bantuan, kerjasama, melalui berbagai media komunikasi atau media massa internasional (Shoelhi, 2009:27).

Media event merupakan peristiwa menarik (*journalistic point of view*) yang menjadi sorotan media untuk dijadikan sebagai agenda media, yang dalam hal ini peristiwa tersebut direncanakan atau spontan, pada akhirnya diseleksi apabila menarik cakupan berita tersebut, maka media massa khususnya televisi dan surat kabar baik dalam edisi cetak maupun elektronik, dimana di dalamnya ada unsur kedekatan, sehingga berita tersebut layak menjadi agenda media. Dalam pandangan Hermin Indah Wahyuni, bahwa peristiwa sebagai *media event* setidaknya memiliki basis penilaian yang dilakukan mengenai nilai berita yang dipilih, beberapa nilai berita diantaranya adalah signifikan, keterkenalan, kedekatan, kemanusiaan dan lainnya (2006:5).

Diplomasi publik (*public diplomacy*) didefinisikan sebagai upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui *understanding, informing, and influencing foreign audiences*. Dengan kata lain, jika proses diplomasi tradisional dikembangkan melalui mekanisme *government to government relations*, maka diplomasi publik lebih ditekankan pada *government to people, government to non government organization, people to people relations* (Roy, 1985:20). Penyelenggaraan diplomasi yang salah satunya di implementasikan melalui kunjungan diplomatik merupakan upaya diplomasi secara langsung yang dilakukan oleh pejabat negara. Kunjungan diplomatik merupakan peristiwa politik, sehingga dalam perspektif politik bahwa kunjungan

diplomati tersebut sangat terkait dengan kedekatan-kedekatan negara lain secara politik, ekonomis atau geografis dengan Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*), metode analisis isi ini dikenal sebagai sebuah metode penelitian yang sistematis, obyektif dan cenderung kuantitatif dengan fokus utama isi pesan di surat kabar (Flournoy, 1989: 12; Wimmer and Dominick, 1997). Karakter sistematis tercermin dari pemberlakuan prosedur yang sama untuk semua isi (*content*) yang di analisis, seperti penggunaan kategori, unit, dan klasifikasi yang diatur secara konsisten dan dipersiapkan sedemikian rupa serta diseleksi untuk memotret isi pesan yang di analisis dan pengkodean data agar tidak bias, selanjutnya objektifitas metode analisis isi dicapai dari *level* prosedural yang diterapkan dan mampu memberi hasil maupun kesimpulan sama bila dilakukan oleh peneliti yang berbeda. Sifat kuantitatif lebih dikaitkan pada dasar analisis dengan hasil perhitungan atau bilangan, yang biasanya dilakukan dengan melihat frekuensi pemunculan, durasi pemunculan, dan luas pemunculan di dalam isi pesan yang ada di media massa yang diteliti (Prajarto, 2010: 4-5).

Menurut Holsti, metode analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara obyektif, sistematis, dan generalis,

maksud generalis artinya penemuan harus memiliki atribut lain dari dokumen dan mempunyai relevansi teoritis yang tinggi. Dengan melihat karakter dan fungsi analisis isi di atas, upaya untuk melihat koverasi *The Jakarta Post* terhadap peristiwa kunjungan diplomatik sangat tepat dilakukan dengan metode analisis isi.

Objek penelitian ini merupakan isi berita di *The Jakarta Post*, sebagai media massa yang *concern* terhadap permasalahan dunia internasional. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan item-item berita kunjungan diplomatik di *The Jakarta Post*

edisi 1 Juli 2010 - 31 Desember 2010 yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data utama dan pengkodean terhadap item-item berita yang diteliti ke dalam *coding sheet*, untuk dilihat kecenderungan dan perhitungan statistik dalam program SPSS.

Unit analisis merupakan satuan terkecil yang dianalisis dapat berupa paragraf, unit analisis dalam penelitian ini adalah teks-teks berita kunjungan diplomatik pejabat negara lain ke Indonesia pada *The Jakarta Post*, adapun detail unit analisis/kajian dan kategorisasi lihat tabel :

Tabel 1. Unit Analisis dan Kategori

Unit Kajian	Kategori	
Posisi Berita	1. <i>Headline News</i> 2. <i>Non headline news</i>	3. Berita pada halaman dalam
Nilai Berita	1. Signifikan 2. Keterkenalan	3. Kedekatan 4. Kemanusiaan
Kecenderungan Berita	1. <i>Pro</i> 2. <i>Netral</i>	3. <i>Kontra</i>
Aktor Kunjungan	1. Presiden dan Perdana Menteri 2. Menteri Negara	3. Duta Besar 4. Lainnya
Agenda Kunjungan	1. Penandatanganan kerjasama	2. Dialog 3. Lainnya
Materi Berita Kunjungan	1. Pertahanan dan Keamanan 2. Ekonomi dan Pembangunan 3. Hukum dan HAM 4. Politik dan Demokrasi	5. Budaya, Pendidikan dan Agama 6. Lainnya

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, yaitu pengkodean, reliabilitas, dan validitas. Untuk melakukan tes realibilitas ditunjuk dua orang pengkodean untuk menggunakan tingkat kesamaan atas kategori dalam bentuk pengkajian dan sumber data pada berita di *The Jakarta Post* yang telah ditentukan dalam

standar reliabilitas. Dalam penelitian ini menggunakan dua orang pengkodean untuk memperoleh reliabilitasnya tetap tinggi, dalam proses penelitian menggunakan kriteria Laswell yang menyatakan bahwa suatu data atau informasi dikatakan mempunyai reliabilitas yang mencukupi apabila jumlah prosentase/kesesuaian antara pemberi koding

mencapai 70% sampai 80%. Reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus yaitu:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Dengan CR adalah *coefficient of reliability* atau reabilitas koefisien adalah rasio dari *coding agreement* terhadap jumlah keputusan yang diberikan oleh para *coder*, M adalah jumlah pernyataan yang disetujui oleh pengkoding dan periset, sedangkan N1 dan N2 adalah jumlah pernyataan yang di kode oleh pengkoding dan periset.

Validitas dilakukan dengan menganalisis sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya dan validitas dibatasi sebagai tingkat kemampuan suatu alat ukur untuk mengungkapkan hal hal yang menjadi sasaran pokok pengukuran pada alat ukur yang digunakan.

Pembahasan

Uji Reliabilitas dan Validitas

Dalam perspektif kuantitas berita di *The Jakarta Post*, pada tahun 2010 terdapat ratusan berita kunjungan diplomatik, namun penelitian ini membatasi pada berita kunjungan diplomatik pejabat negara lain ke Indonesia dalam kurun waktu 1 Juli 2010 hingga 31 Desember 2010, dan pemilihan

dalam jangka waktu selama enam bulan karena *pertama* adanya homogenitas dari jenis item berita, *kedua* dapat memecahkan persoalan sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Dari 86 (delapan puluh enam) berita kunjungan diplomatik yang dianalisis dipilih 1 berita kunjungan diplomatik dipilih untuk diuji reliabilitasnya oleh dua orang pengkoder. Hal ini merujuk pada pandangan Nunung Prajarto bahwa dalam pengujian reliabilitas sesungguhnya cukup dilakukan dengan mengambil beberapa item informasi, sebab akan menimbulkan kesalahan jika uji reliabilitas diterapkan pada keseluruhan item yang dikaji, 2 (dua) item berita kunjungan diplomatik yang dipilih berjudul: "*Indonesia, Austria move toward broader cooperation*" dan *Indonesia is part of me, Obama Says* (Prajarto, 2010:65).

Pengkodingan ini dilakukan untuk menguji keandalan dan keterpercayaan unit analisis dalam penelitian ini, maka dilakukan uji reliabilitas terhadap kategori yang telah ditetapkan, dengan menggunakan rumus Holsti, yaitu:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Hasil keseluruhan 6 unit analisis yang diterapkan pada 2 (dua) item berita yang di pilih adalah dua orang pengkoder telah menyepakati 9 point unit analisis, dan 3 point yang tidak disepakati. Hasil ini diterapkan pada rumus Holsti di atas:

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2} \rightarrow CR = \frac{2(9)}{12 + 12} \rightarrow CR = \frac{18}{24} \rightarrow CR = 0.75$$

Hasil uji reliabilitas diperoleh adalah 0,75 jika dipersentasekan maka diperoleh $0,75 \times 100 = 75\%$, dari hasil uji reliabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat keterpercayaan unit analisa penelitian telah mencukupi. Merujuk pada kriteria Laswell bahwa parameter tingkat reliabilitas antar pengkodeur tidak harus 100% kesamaannya, kesamaan nilai uji reliabilitas 70%-80% dapat dikategorikan sebagai keterpercayaan yang cukup. Artinya 75% merupakan nilai uji reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Analisis

Liputan kunjungan diplomatik pejabat negara lain ke Indonesia di *The Jakarta Post* tentu memiliki warna tersendiri dalam wacana perpolitikan nasional maupun internasional, kecenderungan berita politik antar satu media dengan media lainnya tentu tidak sama. Meminjam bahasa Ibnu Hamad (2004:163) bahwa terdapat cerita di belakang teks "setiap media memiliki orientasinya sendiri dalam berita-berita politik yang dibuatnya", media memiliki maksud dan orientasi tertentu dalam berita politik yang disajikannya, ada yang lebih mengutamakan kepentingan ideologis, politik, ekonomis, sementara disisi lain memilih visi idealis berbangsa.

Kepentingan yang tertuang dalam teks *The Jakarta Post* dapat dilihat dari kecenderungan berita yang disajikan, kecenderungan kuantitas berita tentu memiliki alasan dan orientasi yang akan dicapai, meliputi:

1. Posisi Berita

Kecenderungan posisi berita yang dianalisis adalah posisi berita dalam kategori: (1) *Headline news*, adalah posisi berita yang letaknya pada halaman depan dan menjadi kepala berita dan berada diposisi utama (*headline*); (2) *Non Headline news* adalah posisi berita yang letaknya pada halaman depan dan bukan berada diposisi utama (*headline*); (3) Berita pada halaman dalam adalah berita-berita yang ditempatkan pada halaman dalam surat kabar (selain halaman depan). Ketiga kategori tersebut di atas untuk mengukur kecenderungan pentingnya *media event* dalam kunjungan diplomatik, kecenderungannya meliputi:

Tabel 2. Posisi Berita

No	Posisi Berita	Frequency	%
1	<i>Headline News</i>	5	5.8
2	<i>Non headline News</i>	5	5.8
3	Halaman Dalam Surat Kabar	76	88.4
	Total	86	100.0

Sumber: data primer yang sudah diolah.

Kecenderungan posisi berita kunjungan diplomatik di *The Jakarta Post* terlihat pada tabel di atas menunjukkan frekuensi berita terbanyak pada halaman dalam surat kabar yang memiliki 76 (88.4%) item berita, dibandingkan dengan *headline news* dan *non headline news* yang hanya berjumlah 5 item berita. Berita kunjungan diplomatik yang berada pada halaman dalam surat kabar, merupakan berita yang posisinya diletakan pada halaman selain halaman pertama (*headline news* dan *non headline news*), baik dalam rubrik internasional (*world*) sebagai

kelaziman berita-berita politik, ekonomi, hukum, yang terkait dunia internasional, maupun rubrik lainnya, seperti nasional, dan lainnya. Berita ini merupakan kategori berita yang penting, karena menempati frekuensi berita paling banyak, dan semakin besar kuantitas berita yang disajikan akan semakin memberikan kontribusi bagi hubungan Indonesia dengan negara yang berkunjung.

Untuk *headline news* menempati posisi berita sama dengan *non headline news* sebanyak 5 item berita dan presentase 5.8 %, ini membuktikan bahwa dalam melakukan *setting* terhadap agenda publik, penempatan berita pada halaman tertentu dengan mempertimbangkan nilai penting informasi bagi masyarakat pembacanya, Namun seyogyanya tidak menghilangkan kaidah penulisan pada posisi yang memiliki berita dinilai lebih penting dan menarik akan ditempatkan pada halaman-halaman yang kemungkinan memudahkan pembaca mengaksesnya.

Kuantitas terbesar berita kunjungan diplomatik pada halaman dalam ini merupakan bukti bahwa pada dasarnya isi media tersebut sudah dicacah-cacah untuk beragam muatan, isi cacah-cacahannya tergantung pada peristiwa yang dianggap layak dan sangat penting oleh media massa. Dalam hal ini media massa menentukan kelayakan pesan yang disampaikan dan bukan pihak lain yang merasa memesan isi media massa (kepentingan publik), dalam arti bahwa media massa memiliki kewenangan mutlak untuk melaporkan

dan tidak melaporkan peristiwa kunjungan diplomatik tersebut, dan meletakkan berita pada posisi *headline news*, *non headline news*, maupun berita pada halaman dalam yang dikehendaki oleh media massa. Hal ini membuktikan bahwa media massa sebagai pemberi informasi, belum merambah pada fungsi edukasi (Prajarto, 2003:3).

Desain *The Jakarta Post* yang menjadikan berita pada halaman dalam dengan kuantitas berita terbanyak terkait dengan diplomasi publik, salah satunya diperankan media massa mengenai agenda kunjungan diplomatik bagi Indonesia adalah kontribusi negara lain di berbagai bidang guna pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga point terpenting adalah adanya kebijakan luar negeri negara lain yang memberikan kontribusi bagi Indonesia. Pandangan penulis terkait dengan kuantitas terbesar berita pada halaman dalam di atas, terdapat hal yang menarik dalam hubungan luar negeri yang dijalin Indonesia dengan tidak melihat kedudukan negara yang berkunjung maupun isu yang sedang naik daun, tetapi lebih mengutamakan harapan dan memberikan manfaat besar dari hubungan Indonesia dengan negara yang berkunjung. Penempatan berita pada halaman dalam tidak mengurangi derajat pentingnya berita kunjungan diplomatik dalam perspektif media massa, tetapi lebih menekankan pada substansi kunjungan diplomatik yang mengarah pada kepentingan nasional dan manfaat bagi publik Indonesia. Nuansa nasionalisme *The Jakarta Post* juga terlihat dalam kategori *headline news*, dalam bahasa

kualitas berita *headline news* merupakan berita yang sangat menarik dan menjadi perhatian publik sehingga memudahkan pembaca mengaksesnya, misalnya kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, yang beritanya berjudul: “*Bakso, nasi goreng...semuanya enak*”, judul tersebut merupakan ungkapan Presiden Barack Obama pada saat jamuan makan dengan Presiden SBY, yang isi beritanya mengulas hubungan diplomatik Indonesia Amerika, termasuk latar belakang Barack Obama yang pernah tinggal di Indonesia (sekolah di SDN Menteng), tentunya berita yang berkaitan dengan pribadi Barack Obama tersebut tidak berkaitan dengan substansi kunjungan diplomatik, namun berita yang disajikan dipandang memiliki nilai penting bagi masyarakat Indonesia “pembangunan karakter bangsa”.

2. Nilai Berita

Hakikatnya unsur nilai berita harus dipenuhi dalam setiap peristiwa sebelum dijadikan berita (Abrar, 1994:5). Penggunaan nilai berita sangat berkaitan dengan parameter penafsiran peristiwa, pendapat, masalah, untuk dapat diangkat menjadi berita. Nilai berita merupakan seperangkat kaidah yang dapat dijadikan pedoman pemilihan kebijakan, terutama dalam pemilihan berita dengan urutan yang paling penting dan yang paling tidak penting. Unit kategori nilai berita yang dianalisis meliputi: (1) signifikan (*significance*) merupakan nilai berita yang menunjukkan pentingnya suatu peristiwa yang terjadi dan memberikan

pengaruh terhadap kehidupan masyarakat; (2) keterkenalan (*Prominence*), nilai berita kunjungan diplomatik yang menunjukkan keterkenalan pejabat (Presiden, dan lainnya) atau negara (negara Adikuasa); (3) kedekatan (*Proximity*), merupakan nilai berita kunjungan diplomatik yang menunjukkan kedekatan pejabat negara lain (psikologis/ emosional) maupun negara (geografis) yang berkunjung ke Indonesia; (4) kemanusiaan (*human interest*) merupakan nilai berita yang menunjukkan sisi-sisi humanis peristiwa yang diberitakan; (5) lainnya adalah nilai berita yang menarik dalam isi berita selain nilai-nilai berita di atas.

Tabel 3. Nilai Berita

No	Nilai Berita	Frequency	%
1	Signifikan	69	80.2
2	Keterkenalan	6	7.0
3	Kedekatan	5	5.8
4	Kemanusiaan	4	4.7
5	Lainnya	2	2.3
	Total	86	100.0

Sumber: Data primer yang sudah diolah

Nilai berita dari kategori signifikan memiliki kecenderungan paling tinggi yaitu 69 item berita (80,2%), dibanding dengan nilai berita keterkenalan 6 item berita (7,0%), kedekatan 5 item berita (5,8%), kemanusiaan 4 item berita (4,7%), dan lainnya sebanyak 2 item berita (2,3%). Skema kecenderungan nilai berita terkait signifikan tersebut, memunculkan informasi baru tentang kejadian yang baru, penting, dan bermakna (signifikan), serta berpengaruh pada para pembacanya yang relevan dan layak dinikmati berita tersebut.

Melalui berita-berita yang ditampilkan,

media massa selain menyajikan informasi juga memberikan pemahaman kepada khalayak, terutama yang kurang memiliki *media literacy* atau tingkat melek media yang tinggi. Tanpa memilah-memilah dan memahami lebih dalam apa yang disajikan dalam berita, khalayak bisa terbawa dalam arahan konstruksi yang dibangun oleh media. Oleh karena itu media massa terutama media cetak sebaiknya lebih menekankan asas keberimbangan dalam pembuatan suatu berita serta melihat sisi makna penting yang terkandung dalam liputan kunjungan diplomatik, sehingga membuktikan bahwa perolehan signifikan lebih besar presentasinya dibanding unit varian yang lain.

Meskipun nilai berita pada keterkenalan memiliki sisi yang menarik dengan perolehan 6 item berita dengan frekuensi 7,0%, ini sebagai perbandingan kunjungan pejabat Amerika lebih besar kuantitasnya di bandingkan pejabat dari Malaysia, padahal Malaysia merupakan tetangga terdekat negara Indonesia dalam kategori kedekatan geografis dapat memiliki nilai berita yang tinggi, namun nilai berita keterkenalan tidak hanya dari sudut pandang geografis, tetapi juga psikologis (kedekatan emosional). Kedekatan emosional pejabat yang berkunjung dalam perolehan 5 item berita (5,8%), hal ini dilihat pada kuantitas pejabat yang kurang atau tidak terkenal atau pejabat negara lain yang memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat Indonesia tentu berbeda dengan pejabat yang tidak memiliki hubungan emosional.

Misalnya Presiden Amerika Serikat Barack Obama dengan Presiden Austria Heinz Fischer tentu memiliki derajat kedekatan yang berbeda bagi masyarakat dan institusi media di Indonesia, kontribusi serta kedekatan dengan masyarakat yang berbeda pula, sehingga liputan kunjungan diplomatik memiliki kecenderungan berita pada Presiden Barack Obama. Untuk sisi kemanusiaan (*human interest*) nilai berita yang menunjukkan sisi-sisi humanis peristiwa yang diwartakan (Shoemaker dan Reese, 1996:110-111; Prajarto, 2010:91), berusaha meyakinkan pembacanya dalam mengedepankan sisi kemanusiaan keterbukaan, meninggalkan pengkotakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan serta tidak berada di bawah pengaruh kepentingan pihak tertentu dalam memunculkan berbagai wacana terkait dengan kunjungan diplomatik, yang mengarah kepada perwujudan masyarakat yang lebih demokratis.

3. Kecenderungan Berita

Media massa tidak bisa hidup dalam situasi yang vakum, struktur dan penampilan media ditentukan oleh banyak hal, di antaranya kecenderungan pro, netral dan kontra, meliputi: (1) kecenderungan pro merupakan isi berita yang berupa dukungan atau berita yang positif terhadap pihak atau kegiatan tertentu; (2) kecenderungan netral merupakan kecenderungan isi berita yang berimbang (netral) dalam memberitakan suatu realitas, atau berita yang tidak menunjukkan kecenderungan keberpihakan ke pihak tertentu; dan (3)

kecenderungan kontra merupakan isi berita yang mengkritik dan cenderung berita negatif ke pihak tertentu (negara atau pejabat yang berkunjung).

Tabel 4. Kecenderungan Berita

No	Kecenderungan berita	Frequency	%
1	Pro	11	12,8
2	Netral	72	83,7
3	Kontra	3	3,5
Total		86	100,0

Sumber: Data primer yang sudah diolah

Media massa memiliki caranya sendiri dalam menuliskan dan menyampaikan sebuah berita kepada khalayak. Tampak pada hasil tabel menunjukkan netral lebih dominan, dengan frekuensi berita sebanyak 72 dan presentase 83,7%, karena isi berita tersebut melihat sejauh mana sisi kenetralan wartawan ketika meliput kunjungan diplomatik. Sehingga kualitas atau bobot produk berita yang merujuk pada sisi yang netral dari peristiwa tertentu apa adanya, harus memenuhi prosedur yang jelas dengan membatasi masuknya opini pribadi wartawan dalam proses produksi berita. Tidak dipungkiri bahwa proses produksi berita yang netral adalah mustahil, karena setiap berita ditulis oleh manusia yang memiliki muatan emosi, maka kewajiban setiap personil dalam sebuah institusi media massa adalah mengupayakan obyektivitas yang kenetralan dalam suatu berita dapat disajikan kepada khalayak.

Dalam melakukan penghimpunan, pencarian dan pelaporan berita membutuhkan wartawan atau pekerja media

harus independen, artinya memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Selain itu, wartawan harus menghasilkan berita yang akurat, berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi, berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara, dan tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain atas berita yang dipublikasikan.

The Jakarta Post telah meletakkan berita tentang kehidupan politik dalam kerangka menciptakan makna (*generating of meaning*) yang utuh dan sehat melalui keberimbangan berita yang disajikan, hal ini terkait dengan perkembangan demokratisasi yang menyediakan ruang bebas bagi publik (*public sphere*) yang bersifat netral. Menurut Ashadi Siregar (2000:190) bahwa fakta publik, kebenaran dan media massa merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan demokrasi, dalam kondisi ini masyarakat dapat menghadirkan diri secara rasional dalam kehidupan publik. Logikanya sederhana, dengan informasi tentang fakta publik yang benar dan disampaikan oleh media jurnalisme secara objektif, maka warga masyarakat akan dapat memproses diri secara rasional dalam membentuk pendapat masalah publik, akumulasi dari proses pembentukan pendapat secara rasional inilah yang menjadi landasan bagi kehidupan publik warga masyarakat. Melalui media massa, masyarakat akan berperan aktif (aktor

aktif) dalam proses komunikasi politik, yang dalam banyak hal sekaligus merupakan usaha nyata pendidikan politik bangsa, khususnya dalam usaha meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kegiatan politik sebagai wahana untuk mengukur eksistensi dirinya sebagai warga negara Indonesia yang ikut bertanggungjawab terhadap kelangsungan negara dan bangsa Indonesia.

4. Aktor Kunjungan Diplomatik

Aktor atau pejabat yang melakukan kunjungan diplomatik adalah pejabat negara lain yang melakukan kunjungan diplomatik ke Indonesia, meliputi Presiden dan Perdana Menteri (termasuk Wakil Presiden dan Wakil Perdana Menteri), Menteri Negara, Duta Besar, dan lainnya dari beberapa pejabat di atas kecenderungan dari item berita yang telah di proses dan menghasilkan *point* presentase dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Aktor Kunjungan

No	Aktor Kunjungan	Frequency	%
1	Presiden dan Perdana Menteri	43	50.0
2	Menteri Negara	31	36.0
3	Duta Besar	6	7.0
4	Lainnya	6	7.0
Total		86	100.0

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Kecenderungan berita kunjungan diplomatik terhadap aktor atau pejabat yang berkunjung, memiliki kecenderungan tertinggi adalah pejabat yang berkedudukan sebagai Presiden atau Perdana Menteri negara lain dengan kecenderungan 43 item berita (50,0 %), dibandingkan dengan

Menteri Negara sebesar 31 item berita (36,0%), dan Duta Besar sebesar 6 item berita (7,0%), serta kategori lainnya. Hal ini wajar jika dilihat dari perspektif agenda media bahwa pejabat yang memiliki jabatan lebih tinggi akan mempengaruhi media, sehingga kuantitas liputannya lebih banyak di bandingkan dengan pejabat yang lebih rendah jabatannya.

Presiden dan Perdana Menteri adalah pemimpin tertinggi eksekutif (pelaksana pemerintahan) yang banyak melahirkan berbagai kebijakan, kebijakan-kebijakan tersebut sebagai fokus utama dalam bertindak, termasuk berbagai kebijakan politik diplomasi. Hal apa yang dilakukan oleh Presiden atau Perdana Menteri baik kebijakan maupun kehidupan pribadi selalu menjadi isu yang menarik bagi media massa. Menurut Severin dan Tankard (2009:278-279) bahwa Presiden Amerika Serikat memberikan pengaruh pada media, Presiden adalah pembuat berita nomor satu di negara tersebut, yang menentukan agenda dan dibahas dalam berita media massa tersebut, isu-isu yang disampaikan oleh Presiden keesokan harinya akan menjadi isu nasional dan harus dipublikasikan oleh media massa.

5. Agenda Kunjungan Diplomatik

Agenda kunjungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara, melalui kegiatan atau upaya untuk membina rasa saling percaya atau untuk memperteguh suatu keyakinan akan gagasan melalui komunikasi internasional yang dijalin, dengan menggunakan berbagai saluran diantaranya,

memperluas jaringan, menanggulangi perbedaan dan salah paham, meningkatkan kerjasama, serta penyelesaian konflik, yang keikutsertaan ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Bentuk dari agenda, meliputi: dialog, dan penandatanganan kerjasama (*Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman), *Agreement* (Persetujuan), *Protocol* (Protokol), *Exchange of Letters* (Nota Persetujuan)), dan lainnya.

Tabel 6. Agenda Kunjungan

No	Agenda Kunjungan	Frequency	%
1	Penandatanganan Kerjasama	23	26.7
2	Dialog	63	73.3
Total		86	100.0

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Berdasarkan hasil dari data di atas menunjukkan agenda kunjungan diplomatik yang lebih banyak dilakukan oleh para pejabat negara asing berkunjung ke Indonesia dengan agenda dialog. Pemunculan frekuensi berita sebanyak 63 item (73,3%), hal ini bertujuan agar dialog yang dilakukan secara langsung melalui desain komunikasi yang telah dibentuk oleh para jajaran pejabat tinggi negara tersebut, dapat menelisik pemerintah dalam mensosialisasikan program yang telah disusun untuk di didiskusikan dan memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga metode berdialog dalam berita kunjungan diplomatik yakni agenda kunjungan berupa dialog, seperti berita yang berjudul "*BDF seeks to promote peace and stability*", adalah mengedepankan proses diplomasi dalam mengatasi dan

menangani berbagai permasalahan bilateral. Dominasi dialog kunjungan diplomatik senada dengan pandangan Pemerintah Indonesia, yang sudah menegaskan bahwa dalam politik diplomasi untuk mencapai tujuan hubungan diplomatik, langkah yang diambil antara lain adalah penguatan mekanisme kerja sama bilateral dengan berbagai negara sahabat. Penguatan tersebut dilakukan dengan menggairahkan atau menghidupkan kembali mekanisme yang telah ada atau menciptakan mekanisme dialog baru, sehingga terbentuk suatu dialog dan konsultasi bilateral yang reguler.

Proses selanjutnya, melalui penandatanganan kerjasama yang dilakukan antara kedua negara, didasari oleh landasan hukum yang kuat dan landasan hukum tersebut biasanya di implementasi oleh Kementerian Negara dalam membidangi program yang disepakati, dan waktu penandatanganan kerjasama biasanya dilakukan pada awal kerjasama dan akan dibuat landasan kerjasama lagi jika ada peningkatan atau perubahan kerjasama. Sedangkan dalam kategori lainnya yang tidak memiliki arah agenda yang jelas, baik dialog, kunjungan ke lapangan maupun penandatanganan *memorandum of understanding*. Kategori lainnya ini merupakan pelengkap kunjungan diplomatik, karena hanya mengulas kehidupan pribadi dan sosial pejabat negara yang berkunjung ke Indonesia.

6. Materi Berita Kunjungan Diplomatik

Materi kunjungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara merupakan program yang dikemas oleh

media massa dalam bentuk materi berita dan disampaikan dalam bentuk pesan secara lugas dan dinamis. Program yang akan disajikan ke khalayak dilakukan melalui kemasan berita

yang berbeda. Materi berita kunjungan diplomatik yang ditampilkan dari berbagai peristiwa yang menarik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Materi Berita Kunjungan

No	Materi Berita Kunjungan	Frequency	%
1	Pertahanan dan Keamanan	9	10.5
2	Ekonomi dan Pembangunan	25	29.1
3	Hukum dan Hak Asasi Manusia	12	14.0
4	Politik dan Demokrasi	11	12.7
5	Budaya, Pendidikan dan Agama	6	7.0
6	Lainnya	23	26.7
Total		86	100.0

Sumber: Data Primer yang sudah diolah

Materi berita kunjungan diplomatik mengenai ekonomi dan pembangunan nasional sedikit menonjol dengan frekuensi berita sebanyak 25 dan presentase 29,1%. Hal ini berbanding tipis dengan materi berita berkategori lainnya sebanyak 23 pemunculan berita dengan indeks presentase 26,7%, sehingga memunculkan bahwa dalam penulisan isi berita tersebut telah melaksanakan fungsi diplomasi secara nyata dengan menjalankan “*people-to-people contact*”, yakni menangani hubungan ekonomi dengan beberapa kegiatan secara langsung dengan memonitor hubungan ekonomi bilateral, juga dikombinasikan dengan tugas tugas lainnya.

Selain itu, untuk dapat lebih dalam menganalisa kecenderungan berita kunjungan diplomatik sebagai media *event* pada surat kabar *The Jakarta Post* periode 1 Juli 2010 – 31 Desember 2010, maka dilakukan tabulasi silang, hasil tabulasi silang meliputi:

1. Tabulasi Silang Posisi Berita dengan Materi Berita Kunjungan

Terwujudnya Indonesia yang aman dan damai merupakan upaya untuk menciptakan suatu kondisi bebas dari bahaya dan segala bentuk ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri serta melihat dari aspek pemerintah dalam berkunjung ke berbagai manca negara demi membahas permasalahan bangsa, di samping itu media massa sebagai mata dan telinga masyarakat dalam memandang serta memberi cermin bagi pemerintah dituangkan dalam berbagai materi berita kunjungan diplomatik, yang kesemuanya dapat di uji tabulasi silang dengan posisi berita. Hal ini diperlukan untuk melihat kecenderungan atau kemenarikan isu / materi peristiwa kunjungan diplomatik dari sudut posisi berita, yang dikaji dalam sub bab ini dan hasil tabulasi silang Materi Berita Kunjungan Diplomatik dengan Posisi Berita dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 8. Tabulasi Silang Posisi Berita dengan Materi Berita Kunjungan

No	Posisi Berita	Materi Berita Kunjungan Diplomatik						Total
		Pertahanan dan Keamanan	Ekonomi dan Pembangunan	Hukum dan HAM	Politik dan Demokrasi	Budaya, Agama, Pendidikan, IPTEK	Lainnya	
1	Headline News	1	0	1	1	0	2	5
2	Non Headline News	0	1	1	0	0	2	5
3	Berita pada halaman dalam	8	24	10	11	6	18	76
Total		9	25	12	12	6	22	86

Sumber: data primer yang sudah diolah

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa berita halaman dalam menempati posisi pertama dengan jumlah kuantitas terbesar (76 berita) di seluruh bidang kunjungan diplomatik, baik pertahanan dan keamanan; ekonomi dan pembangunan; hukum dan hak asasi manusia; politik dan demokrasi; budaya, agama dan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun kategori lainnya yang di dalamnya terkandung *comprehensive partnership*.

Analisis penulis mengenai tabulasi silang antara materi berita kunjungan diplomatik dengan posisi berita, yang akan penulis awali dengan jumlah kuantitas materi berita kunjungan diplomatik yang paling besar kuantitasnya dalam perspektif diplomasi Indonesia di berbagai bidang, meliputi:

a. Diplomasi Ekonomi dan Pembangunan

Diplomasi ekonomi dan pembangunan menempati posisi yang utama dalam berita

kunjungan diplomatik (25 item berita), dengan kecenderungan pada posisi berita pada halaman dalam (24 item berita) dan 1 beritapada halaman *non headlinenews*. Hal ini menunjukkan bahwa isu diplomasi ekonomi dan pembangunan lebih menekankan pada substansi dan kepentingan nasional dan kurang menghiraukan penempatan berita dengan akses halaman depan. Diplomasi ekonomi sebagai prioritas utama dalam hubungan bilateral tentu dilatarbelakangi oleh hubungan ekonomi dan perdagangan internasional suatu negara berperan penting dalam hubungan luar negeri. Bahkan, hubungan internasional kontemporer menunjukkan kebutuhan politik luar negeri (*necessity of foreign policy*) yang meningkat dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan pencapaian pembangunan kesejahteraan bangsa dan negara.

b. Diplomasi "Lainnya"

Kategori diplomasi lainnya adalah

diplomasi yang materinya merupakan gabungan dari beberapa isu atau bidang dalam hubungan bilateral, dalam kategori ini tidak diutamakan bidang tertentu, tetapi dari dua atau lebih bidang yang dijalinan kerjasama juga mendapat posisi yang sama. Salah satu yang masuk dalam kategori ini adalah *comprehensive partnership* merupakan “barang dagangan” dalam melakukan diplomasi yang dibawa oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama, dibawah kepemimpinan Presiden Barack Obama, politik diplomasi Amerika Serikat mengarah pada *comprehensive partnership* (kerjasama menyeluruh) di berbagai bidang.

c. Diplomasi dalam bidang Politik dan Demokrasi; serta Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kecenderungan kuantitas berita kunjungan diplomatik dalam kategori materi berita politik dan demokrasi sebesar 12 item berita, 11 berita pada halaman dalam dan 1 berita pada halaman *headline news*, sementara materi hukum dan hak asasi manusia memiliki kuantitas kecenderungan sebesar 11 item berita, 10 item berada pada posisi berita pada halaman dalam dan 2 berita pada halaman *headline news*. Isu politik, demokrasi, hukum dan hak asasi manusia ini saling beriringan, karena keempat hal tersebut merupakan ciri negara modern. Perubahan mendasar dalam politik internasional adalah munculnya isu-isu baru hubungan internasional pasca berakhirnya perang dingin, masyarakat internasional tidak hanya tertarik pada masalah-masalah yang terkait dengan keamanan dan militer,

tetapi juga meningkatkan perhatian pada terhadap isu-isu kemanusiaan seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, perlindungan hukum.

Perhatian masyarakat internasional semakin meningkat karena pemerintah di banyak negara seringkali terlibat dengan pelanggaran hak asasi manusia, negara yang otoriter, dan penegakan hukum yang tidak berkeadilan. Isu-isu tersebut sampai saat ini masih menjadi citra buruk Indonesia di mata internasional, misalnya Indonesia masing dipandang sebagai negara pelanggar hak asasi manusia paling besar dan penegakan hukum di Indonesia cenderung tidak adil banyak korupsi, politik dan demokrasi belum tumbuh secara matang. Misalnya terkait dengan diplomasi Hak asasi manusia, Rein Mullerson mendefinisikan diplomasi HAM sebagai pemakaian instrumen-instrumen politik luar negeri dan upaya mempromosikan HAM, selain pemakaian isu-isu HAM untuk memperoleh tujuan-tujuan politik luar negerinya. Artinya bahwa kuantitas berita ini dilatarbelakangi bahwa media ikut turut serta dalam peningkatan dalam diplomasi tersebut yang bertujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan positif yang konkrit dalam kondisi politik, demokrasi, hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

d. Diplomasi Pertahanan dan keamanan

Konteks diplomasi ini menilai bahwa politik diplomasi tidak akan pernah meninggalkan isu dan kekuatan tradisional pertahanan dan keamanan, dinilai sebagai isu tradisional sebab isu pertahanan dan

keamanan adalah isu lama yang sangat terkait dengan nuansa saling mendominasi negara dan kekuasaan negara terhadap negara lain, konteks diplomasi ini memfokuskan perhatian pada strategi pertahanan dan keamanan suatu negara, pengerahan kekuatan untuk mengadakan pendekatan sambil mempercayai bahwa kekuasaan adalah komoditas yang perlu diperjuangkan, sehingga semakin banyak yang dimiliki oleh satu pihak dan menyebabkan berkurangnya pemilikan pihak lain. Diplomasi pertahanan dan keamanan tetap menjadi isu menarik, sekalipun isu ini sudah mulai eredup dibandingka isu ekonomi dan politik.

e. Diplomasi Budaya, Pendidikan dan Agama

Misi diplomatik budaya, agama dan pendidikan merupakan isu yang sering disatukan dalam kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain, isu ini menempati urutan terkahir dalam urutan

pentingnya diplomasi Indonesia, sebab isu ini menyangkut pemahaman budaya bangsa yang berbeda-beda, dan isu ini muncul karena adanya konflik berlatar belakang agama di berbagai belahan dunia, namun tetap saja isu ini kurang bernilai strategis bagi dunia luar, khususnya negara-negara barat.

2. Tabulasi Silang Agenda Kunjungan dengan Nilai Berita

Uji tabulasi ini diperlukan untuk melihat kecenderungan agenda kunjungan diplomatik dalam perspektif nilai berita, sebab beragamnya agenda kunjungan memiliki nilai berita yang beragam pula, dalam penentuan *media event* lazimnya yang dijadikan dasar adalah nilai berita dari agenda kunjungan diplomatik yang menarik, semakin menarik agenda kunjungan diplomatik maka akan semakin tinggi nilai beritanya. Hasil tabulasi silang antara agenda media dengan nilai berita, lihat tabel:

Tabel 9. Tabulasi Silang Agenda Kunjungan dengan Nilai berita

No	Nilai Berita	Agenda Kunjungan Diplomatik			Total
		Penandatanganan Kerjasama	Dialog	Lainnya	
1	Signifikansi	23	46	0	69
2	Keterkenalan	0	0	6	6
3	Kedekatan	0	0	5	5
4	Kemanusiaan	0	4	0	4
5	Lainnya	0	2	0	2
Total		23	52	11	86

Sumber: data primer yang sudah diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai berita signifikansi memiliki 69 item berita yang berkecenderungan pada kategori agenda kunjungan baik penandatanganan kerjasama maupun agenda dialog, sementara

keterkenalan (6 item berita) dan kedekatan (5 item berita) lebih cenderung ke arah agenda kunjungan diplomatik kategori lainnya. Sementara nilai berita kemanusiaan (4 item berita) dan nilai berita lainnya (2 item berita)

justru memiliki kecenderungan pada agenda kunjungan diplomatik dalam kategori dialog. Pandangan penulis terkait hal di atas, yaitu:

Pertama, Signifikansi penandatanganan kerjasama dan dialog. Peranan media massa dalam hubungan internasional, khususnya hubungan bilateral telah memunculkan paradigma bahwa media massa modern telah menegaskan ide “diplomasi tanpa diplomat (*diplomacy without diplomat*)”, dalam hal ini media massa ikut serta melakukan pengaturan *setting* dan mekanisme diplomasi. Ide diplomasi tanpa diplomat menyebabkan peranan media massa yang besar dan dianggap seringkali sebagai penunjang bahkan penghambat diplomasi, dalam konteks uji tabulasi silang ini bahwa media massa *The Jakarta Post* memiliki kecenderungan sebagai penunjang diplomasi, sebab arah agenda kunjungan diplomatik dilandasi nilai berita signifikansi. Pandangan Prajarto (2010:90) bahwa nilai berita signifikansi dalam sebuah isu politik lebih menekankan pada pentingnya suatu peristiwa politik yang terjadi.

Nilai berita agenda penandatanganan kerjasama dan dialog merupakan langkah yang diambil dalam diplomasi Indonesia melalui peranan para diplomat senada dengan diplomasi tanpa diplomat, artinya peranan media massa *The Jakarta Post* juga bertujuan untuk penguatan mekanisme kerja sama bilateral Indonesia dengan berbagai negara sahabat, kelebihanannya adalah bahwa media massa *The Jakarta Post* yang memiliki jangkauan luas menyentuh warga negara asing di belahan dunia, dan

melalui liputan tersebut diplomasi menjadi lebih efektif dan efisien. Nilai signifikansi sebagai landasan *media event* dalam agenda penandatanganan kerjasama dan dialog sebagai inti diplomasi adalah bentuk penguatan dengan menggairahkan atau menghidupkan kembali mekanisme yang telah ada atau menciptakan mekanisme dialog baru, sehingga terbentuk suatu dialog dan konsultasi bilateral yang regular. Dengan adanya mekanisme bilateral yang efektif melalui liputan di media massa, yang intinya bahwa *The Jakarta Post* telah mewujudkan *setting* dan mekanisme diplomasi dalam hubungan bilateral, yaitu: *pertama*, media massa lebih mengedepankan proses diplomasi dalam mengatasi dan menangani berbagai permasalahan bilateral dengan melibatkan berbagai elemen pembaca berita, sehingga tujuan kepentingan nasional menjadi terwadahi dan diplomasi publik menjadi lebih tepat dan komprehensif. Permasalahan dalam hubungan diplomatik yang diliput akan dibaca oleh kalangan luas, sehingga dalam proses diplomasi akan melibatkan berbagai elemen bangsa, pemerintah sebagai corong diplomasi, masyarakat Indonesia maupun masyarakat negara lain, kelompok *non government organization*, kalangan akademisi, yang kesemuanya tersebut merupakan aktor diplomasi yang harus ikut “urun rembuk” dalam mengatasi berbagai persoalan dalam hubungan bilateral. Dalam pandangan Sukawarsini Djelantik (2008:73) bahwa media massa memiliki fungsi yang sangat strategis karena menyatukan semua

aktor diplomasi publik melalui agenda komunikasi internasional yang dilakukan, berbagai liputan memiliki signifikansi dengan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, sebab nilai berita signifikansi inilah sebagai tolok ukur bahwa agenda media penandatanganan kerjasama dan dialog merupakan bentuk agenda diplomasi yang menyentuh persoalan bangsa dan negara, sekaligus tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Kedua, dengan nilai berita signifikansi, media massa *The Jakarta Post* sebagai salah satu dari aktor diplomasi publik juga mampu mengakomodir pandangan dari berbagai aktor diplomasi publik lainnya, baik aktor *government* (pemerintah), *professional and conflict resolution* (kalangan profesional dan aktor dalam penyelesaian konflik), *business* (pengusaha), *private citizen* (masyarakat), *Research and Education* (Aktor Peneliti dan Pendidik), *Activism* (kalangan aktivis), *Religious* (kalangan agamawan), *Funding* (kalangan pemodal) (Sukawarsini Djelantik, 2008:73). Kesembilan aktor tersebut yang menentukan signifikansi hubungan bilateral, dan sekaligus kesembilan aktor dengan di gawangi oleh media massa *The Jakarta Post* mampu memonitor kemajuan implementasi kesepakatan yang telah ada, memanfaatkan peluang-peluang kerjasama yang ada dan mengidentifikasi kerjasama yang baru, serta mengembangkan kemitraan dalam menghadapi tantangan-tantangan global.

Kedua, nilai berita keterkenalan dan kedekatan dalam berita kunjungan diplomatik. Keterkenalan dan kedekatan

memiliki kecenderungan pada kategori lainnya dalam agenda kunjungan diplomatik, kategori lainnya ini pada dasarnya merupakan kategori yang dalam berita tersebut tidak disebutkan (tidak jelas) mengenai agenda yang dilaksanakan, beritanya hanya membahas kunjungan pejabat negara lain ke Indonesia tetapi tidak menguraikan agenda apa yang dilakukan oleh pejabat negara di Indonesia tersebut.

Nilai keterkenalan seorang pejabat dan kedekatan pejabat yang bersangkutan dengan masyarakat Indonesia atau negara Indonesia, ini juga menjadi daya dukung nilai signifikansi, sebab dalam praktik diplomasi keberadaan pejabat yang berkunjung juga ikut menentukan politik diplomasi negara nya. Nilai keterkenalan dan kedekatan tersebut materinya berisi profil atau hubungan historis maupun emosionalitas dengan negara dan bangsa Indonesia adalah nilai tambah penghargaan pemerintah terhadap aktor / pejabat yang berkunjung. Nilai berita ini tidak membangun hubungan diplomasi melalui jalur formal, *government to government*, tetapi lebih mengarah pada *government to people* maupun *people to government*, hubungan yang terjalin antara masyarakat Indonesia dengan pejabat negara lain atau sebaliknya akan memberikan nuansa baru dalam menjalin hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain, misalnya hubungan Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama (*government*) dengan masyarakat Indonesia (*people*) akan memberikan pengaruh pada kebijakan-kebijakan politik luar negeri Amerika

Serikat yang terkait dengan dunia Islam, sebab masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, yang kemudian politik luar negara Amerika Serikat ini mengarah pada pelibatan Indonesia sebagai mitra Amerika Serikat dalam penyelesaian masalah konflik keagamaan di berbagai negara dan sebagai contoh demokrasi dalam masyarakat yang plural.

Ketiga, nilai berita kemanusiaan dan kategori nilai berita lainnya. Nilai kemanusiaan (4 item berita) dan kategori nilai berita lainnya (2 item berita) memiliki kecenderungan pada kategori agenda dialog, nilai berita kemanusiaan ini terkait dengan tema dialog pejabat negara, sisi humanisme ditonjolkan dalam berita tersebut, sehingga sisi humanisme tersebut yang menjadi isu utama dalam hubungan bilateral, semisal adanya bencana gunung meletus di Yogyakarta, tentu membawa nuansa humanisme pejabat negara lain untuk “urun rembuk” membantu penyelesaian bencana tersebut. Sementara nilai berita lainnya adalah nilai berita selain nilai berita

di atas, seperti nilai konflik, dan lainnya. Artinya bahwa nilai berita kemanusiaan dan kategori nilai berita lainnya ini merupakan nilai berita yang terkait dengan tema dan kondisional Indonesia dan fakta hubungan internasional, sehingga hal ini berkecenderungan pada mekanisme dialog, jika yang diagendakan adalah dialog mengenai konflik perbatasan Indonesia-Malaysia, maka nilai berita tersebut jelas akan mengarah pada nilai berita konflik, dan lainnya.

3. Aktor Kunjungan Diplomatik dengan Kecenderungan Berita

Uji tabulasi silang ini diperlukan untuk melihat kecenderungan berita dalam kategori pro, netral dan kontra terhadap aktor kunjungan diplomatik, dalam arti melihat keberpihakan media *The Jakarta Post* dalam menyusun *media event* yang mengarah pada aktor atau pejabat tertentu. Hasil uji tabulasi silang antara aktor atau pejabat yang berkunjung dengan kecenderungan berita dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Tabulasi Silang Aktor Kunjungan dengan Kecenderungan Berita

No	Kecenderungan Berita	Aktor Kunjungan Diplomatik				Total
		Presiden/ Perdana Menteri	Menteri Negara	Duta Besar	Lainnya	
1	Pro	11	0	0	0	11
2	Netral	29	31	6	6	72
3	Kontra	3	0	0	0	3
Total		43	31	6	6	86

Sumber : Data Primer yang sudah diolah.

Dari tabel di atas terlihat bahwa kecenderungan pro lebih mengarah pada aktor kunjungan yang berkedudukan sebagai

Presiden atau Perdana Menteri dengan kuantitas berita kunjungan diplomatik sebesar 11 item berita (12,80%), sementara

kategori netral memiliki frekuensi sebesar 72 item berita (83,70%) yang memiliki kecenderungan pada aktor Presiden atau Perdana Menteri, Menteri Negara, Duta Besar dan Lainnya. Sedangkan kategori kontra juga mengarah pada aktor Presiden / Perdana Menteri sebesar 3 item berita (3,50%). Pandangan penulis terkait dengan tabulasi silang di atas yaitu :

Pertama, kecenderungan netral adalah kecenderungan yang memiliki kuantitas berita yang paling besar (72 item berita) yang mengarah pada keseluruhan aktor pejabat kunjungan diplomatik, baik Presiden dan Perdana Menteri, Menteri Negara, Duta Besar, dan Lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa media massa dalam memberitakan kunjungan diplomatik memiliki keberimbangan dalam beritanya, kecenderungan netral ini menandakan bahwa pada dasarnya berita-berita di *The Jakarta Post* tidak memiliki keberpihakan pada negara atau pejabat negara lain.

Kecenderungan netral, seperti dalam berita yang berjudul "*Malaysian Trade Minister visits RI Minister Hatta Rajasa*", berita ini terkait dengan kunjungan Menteri Perdagangan Malaysia ke Indonesia. Kunjungan ini merupakan kunjungan untuk melakukan evaluasi kerjasama atau perbaikan hubungan bilateral, sebab ketika itu Indonesia-Malaysia bermasalah dengan klaim-klaim budaya sepihak oleh Malaysia. Berita ini tidak memihak Indonesia dan tidak mengungkap berbagai kesalahan Malaysia (sisi negatif). Intinya berita ini tidak mempertajam konflik yang terjadi antara

Indonesia-Malaysia pada saat kunjungan Menteri Perdagangan Malaysia ke Indonesia, sebab jika media massa berpihak kepada Indonesia tentu akan menilai negatif setiap kunjungan pejabat negara dari Malaysia, namun dalam berita ini terlihat bahwa netralitas dilakukan demi pengutamaan kunjungan diplomatik dan pengutamaan hubungan yang stabil Indonesia-Malaysia, yang isi beritanya meliputi: *I come here to improve the two countries' ties and hold personal talks," Datuk Mustapa said as quoted by kompas.com. There were seven key points on trade and investment, labor, communication, fisheries, forestry, education, and tourism to be discussed by the two ministers...*" (*The Jakarta Post*, 3 Agustus 2010), dengan kecenderungan netral tersebut, bahwa *The Jakarta Post* dalam memberitakan kunjungan diplomatik "apa adanya" yang tidak berat sebelah, sesuai dengan realitas, tidak memihak Indonesia atau negara yang berkunjung, apalagi memiliki keberpihakan pada pejabat yang berkunjung. Hal ini merupakan bukti bahwa media massa dalam memberitakan kunjungan diplomatik secara independen serta tidak terpengaruh oleh faktor tertentu, misalnya faktor negara adikuasa Amerika Serikat. Kecenderungan netral ini jika ditelaah lebih lanjut, beritanya akan mengarah pada penekanan aspek relevansi (*relevance*) berita kunjungan diplomatik dengan kepentingan publik, berita kunjungan diplomatik bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat Indonesia, dan terdapat substansi berita sebagai sarana berdiplomasi. Intinya bahwa

kecenderungan netral berita kunjungan diplomatik memiliki keberpihakan pada aspek kemanfaatan bagi pembangunan masyarakat, bangsa dan negara atau sesuai dengan tujuan diplomasi publik.

Kedua, kategori kecenderungan-pro adalah berita kunjungan diplomatik yang memiliki keberpihakan pada aktor kunjungan diplomatik, bahwa media memberikan penilaian yang mendukung kunjungan pejabat tersebut. Kecenderungan pro beritanya tidak membahas hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain, tetapi lebih menitikberatkan pada materi yang bersifat pribadi pejabat negara lain yang berkunjung ke Indonesia, atau profil pejabat, latar sosiologis, historis dan emosionalitas pejabat yang berkunjung dengan masyarakat Indonesia.

Dalam kategori kecenderungan pro media massa memberikan informasi yang baik mengenai pejabat yang berkunjung, latar belakang sejarah kehidupan pejabat dan hubungan pejabat yang bersangkutan dengan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Misalnya berita yang berjudul "*Indonesia awards US president's late mother*, materi beritanya: "*Stanley Ann Dunham, the mother of US President Barack Obama, who crisscrossed villages for her research, was presented the highest state award by President Susilo Bambang Yudhoyono, a gesture which "deeply moved" the visiting president..*" (Rangga Dian Fadhillah, *The Jakarta Post*, Edisi 10 November 2010:16).

Dalam konteks diplomasi publik, 2 berita di atas memang layak untuk

diakomodir dalam berita-berita kunjungan diplomatik, namun perlu adanya pembatasan terhadap kuantitas berita semacam itu yang disajikan oleh *The Jakarta Post*, kecenderungan kuantitas sebesar 12,80% justru akan menimbulkan problem tersendiri bagi *The Jakarta Post*. Menurut penulis, bahwa berita-berita sejenis idealnya disatukan dengan berita yang mengandung substansi hubungan bilateral dengan negara lain (satu judul), intinya penulis sependapat jika aspek pribadi pejabat yang berkunjung juga diberitakan, namun beritanya jangan dilepaskan substansi pokok kunjungan diplomatik, yang materinya membahas hubungan bilateral dengan negara lain. Intinya bahwa kecenderungan pro yang memiliki keberpihakan pada pejabat yang berkunjung merupakan nilai tambah, namun yang harus diutamakan adalah nilai pokok diplomasi, yang memiliki kriteria bahwa kecenderungan pro idealnya mengarah pada keberhasilan pejabat yang berkunjung dalam melakukan kerjasama bilateral dengan Indonesia, kebijakan yang menguntungkan Indonesia, dan lainnya. *Ketiga*, kecenderungan kontra merujuk pada aktor Presiden sebesar 3 item berita (3,50%), kriteria kecenderungan ini adalah berita yang lebih menekankan pada aspek negatif kunjungan pejabat negara, misalnya kunjungan negara yang tidak substansi atau hanya sebatas kunjungan simbolik saja.

Dalam hubungan internasional media massa memiliki peranan dalam diplomasi melalui liputannya, yang liputannya tersebut berpijak pada pengutamaan kepentingan

nasional. Sebagai institusi kemasyarakatan, yang menjalankan fungsi imperatif dari kepentingan warga dalam perspektif masyarakat kewargaan (*civil society*), untuk itu basis keberadaan media massa adalah dari konsep kebebasan pers (*press freedom*) sebagai bagian dari norma untuk tatanan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Norma kebebasan pers merupakan prasyarat bagi seluruh proses demokratis dalam masyarakat negara, pers bebas bukan berarti pekerja jurnalisme dan media pers boleh bertindak semaunya. Untuk itu ada baiknya diingat hak-hak kebebasan yang memiliki dua dimensi, yaitu “bebas dari” dan “bebas untuk”, dua hal yang pada hakekatnya tidaklah identik (Siregar, 2000:1882).

“Kebebasan dari” secara sederhana biasa ditempatkan dalam berhubungan dengan kekuasaan lain dalam sebuah negara, misalnya pemerintah, dunia usaha, tokoh politik, dan lainnya. Pada sisi lain sebenarnya perlu dilihat *raison d’etre* bagi kebebasan itu yang tidak hanya dikaitkan dengan eksistensi media massa “bebas untuk” bertindak, namun bebas untuk bertindak demi terpenuhinya hak masyarakat. Media massa sebagai institusi masyarakat dengan sendirinya bergerak atas dasar melayani kepentingan masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang benar dan obyektif. Sebab fakta-fakta dan informasi independen tentang peristiwa kunjungan diplomatik akan jadi referensi bagi masyarakat dalam membuat keputusan dan menciptakan suasana yang membuat semua komponen bangsa bersikap aktif dan

berfikir integratif. Kovach mengingatkan bahwa tujuan paling penting bagi jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri, untuk itu independensi media sangatlah penting. Independen dari otoritas politik, otoritas sosial atau bisnis, dan tidak ada bias personal. Loyalitas jurnalis semestinya bukan loyalitas pada pemilik media tetapi loyalitas kepada warga negara atau loyalitas pada kepentingan nasional Indonesia.

Artinya bahwa tujuan utama jurnalisme terkait kunjungan diplomatik adalah menempatkan kepentingan pihak yang berkuasa agar tetap berkorelasi dan bertanggungjawab kepada kepentingan publik, politik diplomasi merupakan kewenangan pemerintah namun dalam pengambilan keputusan politik diplomasi harus melibatkan masyarakat dan hasilnya juga dilaporkan kepada masyarakat melalui media massa. Senada dengan pandangan di atas bahwa dalam diplomasi publik, pemerintah bukan satu-satunya aktor dalam diplomasi, tetapi terdapat 9 aktor dalam diplomasi publik, seperti lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, kalangan profesional, pengusaha dan pemilik modal, peneliti, akademisi, aktivis, kalangan agamawan, dan lainnya juga ikut melakukan komunikasi internasional dengan caranya sendiri, bahkan melakukan diplomasi dengan caranya sendiri, misalnya media massa melakukan diplomasi dengan berbagai liputannya. Dengan banyaknya aktor yang terlibat dalam diplomasi

publik memberikan implikasi adanya pengakomodiran informasi dari berbagai aktor guna menjembatani mekanisme diplomasi *government to government, people to government, people to people, non government to non government*, maupun *people and non government to government*, dan lainnya.

Simpulan

Media massa merupakan alat komunikasi internasional dalam diplomasi publik, melalui liputan beritanya tujuan diplomasi dengan perjuangan kepentingan nasional Indonesia dengan negara lain tercapai. Media massa sebagai salah satu ujung tombak diplomasi publik telah memberikan angin segar bagi Indonesia, ruang diplomasi terbuka lebar, citra positif dapat ditingkatkan, namun hal ini belum disertai dengan pemahaman fungsi media massa sebagai media diplomasi publik, misalnya kecenderungan berita pro yang mengarah pada dukungan media massa terhadap pejabat yang berkunjung bukan substansi hubungan bilateral.

Sebagai saran penelitian *Media event The Jakarta Post* harus mengacu pada agenda politik diplomasi negara dengan memperhatikan suara-suara masyarakat, sehingga dalam menyajikan berita lebih mengutamakan kepentingan nasional bangsa dan negara Indonesia, sekaligus memberikan ruang terbuka bagi masyarakat sebagai cerminan demokrasi. Untuk itu *The Jakarta Post* perlu menata kembali pesan politik yang mengarah pada pembentukan

masyarakat demokratis, dalam memberitakan kunjungan diplomatik *The Jakarta Post* bukanlah corong kekuasaan, tetapi corong politik diplomasi yang menekankan pada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Daftar Pustaka

- Djelantik, Sukawarsini., (2008), *Diplomasi: Antara Diplomasi dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Flournoy, Don Michael., (1989), *Analisa Isi Surat Kabar-Surat Kabar Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Hamad, Ibnu., (2004), *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Analysis Discourses Terhadap Berita-Berita Politik*, (Jakarta: Granit)
- Holsti, Ole R. (1969), *Content Analysis for the Social Sciences and Humanities*, (Massachusetts: Addison)
- Indah Wahyuni, Hermin., (2000), Relasi Media-Negara-Masyarakat dan Pasar Dalam Era Reformasi, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 4 Nomor 2.
- (2007), Relasi Media – Politik Dalam Perspektif Teori Sistem: Pendekatan Alternatif Untuk Kajian Sistem Media dan Sistem Politik Indonesia, *Jurnal Komunikasi "IKON"* Vol.1 Nomor 1.
- McCombs, Maxwell & Reynolds, Amy, (2009), "News Influence on Our Pictures of the World" dalam Bryant, Jennings &

- Zillman, Dolf, (2009), *Media Effects: Advances in Theory and Research*, Third Edition, (London: Lawrence Erlbaum Associates).
- Muhtadi, Asep Saeful., (2008), *Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru*, (Bandung: Remaja Rosda Karya).
- Prajarto, Nunung., (2003), *Media Massa dan Sosialisasi Politik Luar Negeri Indonesia*, makalah pada Seminar Nasional Peran Media Massa dan Pengaruhnya Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri, (Departemen Luar Negeri dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 26 Juni 2003).
- , (2010), *Analisis Isi: Metode Penelitian Komunikasi*, (Yogyakarta: Fisipol UGM).
- Roy, Samendra., (1993), *Diplomasi*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Shoelhi, Muhammad., (2009), *Komunikasi Internasional Perspektif Jurnalistik*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media)
- Shoemaker, Pamela J., dan Stephen D. Reese, (1996), *Mediating The Message*, Second Edition, (New York: Longman Publisher)
- Siregar, Ashadi., (2000), Media Pers dan Negara: Keluar Dari Hegemoni, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 4, Nomor 2.
- Wimmer, Roger D., dan Joseph R. Dominick., (2006), *Mass Media Research*, (California: Thomson)